

UANG DAN KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Anita Rahmawaty

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Indonesia

e-mail: ita_rahma@yahoo.co.id

Abstract: *This paper describes the concept and functions of money in the Islamic economics perspective and analyze the role of money in monetary policy in Islam. The review was interesting to be discussed because there are fundamental differences between the concepts and functions of money in the modern economy and Islamic economics perspectives. In Islam, money is a flow concept and public goods, while capital is a stock concept and private goods. Instead, the concept of money in a modern economy is often interpreted as interchangeability that money as money and money as capital. The presence of money in the economic system will affect the economy of a country, which is usually associated with monetary policy. However, differences in the prevailing economic system, would have a different view about money and monetary policy.*

Abstrak: *Tulisan ini mendeskripsikan tentang konsep dan fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam dan menganalisis peran uang dalam kebijakan moneter dalam Islam. Kajian ini menarik untuk dibahas karena ada perbedaan mendasar antara konsep dan fungsi uang dalam perspektif ekonomi modern dan ekonomi Islam. Dalam Islam, uang adalah flow concept dan public goods, sedangkan modal merupakan stock concept dan private goods. Sebaliknya, konsep uang dalam ekonomi modern sering diartikan secara bolak-balik bahwa uang sebagai uang dan uang sebagai modal. Kehadiran uang dalam sistem ekonomi akan mempengaruhi perekonomian suatu negara, yang biasanya dikaitkan dengan kebijakan moneter. Namun, perbedaan dalam sistem ekonomi yang berlaku akan memiliki pandangan yang berbeda tentang uang dan kebijakan moneter.*

Kata Kunci: *uang, kebijakan moneter, ekonomi Islam*

Pendahuluan

Uang dan kebijakan moneter selalu menjadi diskursus menarik untuk diperbincangkan dalam kajian ekonomi Islam. Hal ini terutama disebabkan oleh dinamisnya sektor moneter yang berkembang jauh lebih pesat dibandingkan perkembangan sektor riil, baik dalam tataran teori dan praktiknya yang terus berevolusi. Bahkan sektor moneter dengan instrumennya telah mendominasi sistem perekonomian global dan semakin mengakar.

Uang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian dan sangat dominan dalam analisis ekonomi makro (Suprayitno, 2005: 187). Uang dikenal sebagai sesuatu yang diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah, baik digunakan untuk membayar pembelian barang dan jasa maupun digunakan untuk membayar hutang. Dengan kata lain, uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan manusia karena uang adalah alat pelancar lalu lintas barang dan jasa dalam semua kegiatan ekonomi.

Hadirnya uang dalam sistem perekonomian akan mempengaruhi perekonomian suatu negara, yang biasanya terkait dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini merupakan faktor penting dalam perekonomian. Namun, perbedaan sistem ekonomi yang berlaku, akan memiliki pandangan yang berbeda tentang uang dan kebijakan moneter. Sistem ekonomi konvensional memiliki pandangan yang berbeda tentang uang dibandingkan dengan sistem ekonomi Islam. Untuk itu, tulisan singkat ini berupaya untuk mengkaji konsep dan fungsi uang dalam perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam serta menganalisis peranan uang dalam kebijakan moneter Islami.

Uang: Perspektif Ekonomi Konvensional

Definisi dan jenis uang

Secara umum, uang berdasarkan fungsi atau tujuan penggunaannya didefinisikan sebagai suatu benda yang dapat dipertukarkan dengan benda lain; dapat digunakan untuk menilai benda lain; dapat digunakan sebagai alat penyimpan kekayaan dan dapat juga digunakan untuk membayar hutang di waktu yang akan datang (Rivai, dkk, 2007: 3). Sementara itu, Samuelson mengemukakan definisi uang sebagai media pertukaran modern dan satuan standar untuk menetapkan

harga dan utang. Senada dengan definisi diatas, Lawrence Abbott mengartikan uang adalah apa saja yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk jual beli atau utang (Ascarya, 2007: 22).

Masyarakat pada umumnya lebih mengenal istilah uang tunai yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang tunai adalah uang yang ada di tangan masyarakat (di luar sistem perbankan) dan siap digunakan setiap saat, terutama untuk pembayaran-pembayaran dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Uang tunai tersebut sering pula disebut sebagai uang kartal. Di Indonesia, uang kartal adalah uang kertas dan logam yang beredar di masyarakat yang dikeluarkan oleh diedarkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan uang yang berada dalam rekening giro di bank umum sering disebut sebagai uang giral. Sementara itu, uang yang disimpan dalam rekening deposito berjangka disebut sebagai uang kuasi. Dengan demikian, terdapat 3 (tiga) jenis uang di Indonesia, yaitu (1) uang kartal; (2) uang giral; dan (3) uang kuasi. Ketiganya ini juga disebut sebagai uang beredar. Uang beredar dalam arti sempit (M1) terdiri dari uang kartal dan uang giral, sedangkan uang beredar dalam arti luas (M2) terdiri dari uang kartal, uang giral dan uang kuasi (Rivai, dkk, 2007: 6).

Namun, terdapat 2 (dua) perbedaan pokok dari ketiga jenis uang tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Rivai, ddk (2007: 6), yaitu:

- a. Bila dilihat dari lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkan, terlihat bahwa uang kartal dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral, sedangkan uang giral dan uang kuasi diciptakan dan diedarkan oleh bank umum.
- b. Bila dilihat dari penggunaannya, uang kartal dan uang giral dapat digunakan langsung sebagai alat pembayaran, sedangkan uang kuasi tidak dapat langsung digunakan sebagai alat pembayaran.

Fungsi uang

Uang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem ekonomi modern. Ekonomi modern tidak akan pernah mencapai tingkat pengembangannya tanpa ada uang. Uang dalam roda pembangunan ekonomi, ibarat sebagai "roda" dalam pusaran industri. Pentingnya uang ini muncul karena adanya dorongan kegiatan pertukaran, sehingga uang pada awalnya dijadikan sebagai alat tukar.

Namun, sejalan dengan perkembangan peradaban manusia dalam

memenuhi kebutuhan ekonominya, maka fungsi uang tersebut telah berkembang dan dapat diklasifikasikan 4 (empat) fungsi uang, sebagaimana diungkapkan oleh Rivai, dkk (2007: 3-4), yaitu:

a. Alat tukar (*medium of exchange*)

Uang dapat digunakan sebagai alat tukar. Apabila tidak ada uang, transaksi hanya dilakukan dengan cara barter, maka tentu sangatlah sulit hidup di dalam perekonomian modern.

b. Alat penyimpan nilai (*store of value*)

Harta kekayaan seseorang dapat berupa barang, seperti tanah, rumah, mobil dan harta berharga lainnya. Meskipun demikian, uang juga dapat digunakan untuk menyimpan kekayaan.

c. Satuan hitung atau alat pengukur nilai (*unit of account / measure of value*)

Uang dapat digunakan sebagai pengukur nilai. Dengan adanya uang, maka nilai suatu barang dapat diukur dan diperbandingkan, seperti mengukur nilai suatu rumah, mobil dengan satuan uang, seperti rupiah, dollar, dan sebagainya.

d. Ukuran standar untuk pembayaran yang tertunda (*standard for deferred payment*)

Fungsi uang ini terkait dengan pinjam-meminjam. Uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut. Jika meminjamkan uang sebesar satu juta rupiah selama lima tahun, maka nilai uang akan bertambah.

Perubahan fungsi uang

Fungsi uang sebagai *medium of exchange* dapat digunakan dan diterima sebagai alat pembayaran. Sebelum ditemukannya koin, komoditi seperti hewan ternak berfungsi sebagai uang, begitu juga dengan logam seperti emas dan perak yang digunakan pada masa lampau. Koin Eropa yang dikenal pada saat ini sebenarnya berasal dari Bizantium dan negara Muslim yang diperkirakan ditemukan pada abad ke-17. Pada masa Islam, Abdul Malik bin Marwan (65-86H/865-705M), seorang khalifah dari Dinasti Umayyah, mengganti koin emas (dinar) Bizantium dan perak (dirham) Persia dengan koin Islam yang bernilai sama dengan *unit of account* (Karim, 2007: 83).

Untuk itu, jika dirunut dari sejarahnya, terdapat 3 (tiga) tahap perkembangan fungsi uang, sebagaimana diungkapkan oleh Karim (2007: 84-86), yaitu: *commodity money*, *token money* dan *deposit money*.

a. *Commodity of money*

Commodity of money (uang komoditas) adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun, tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga hal penting, yaitu:

- 1) Kelangkaan (*scarcity*), yaitu ketersediaan barang itu harus terbatas.
- 2) Daya tahan (*durability*), yaitu barang tersebut harus tahan lama.
- 3) Nilai tinggi, artinya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.

Dari uraian tentang kualitas di atas, jelas bahwa logam (emas dan perak) sebagai *medium of exchange* di masa lalu, memenuhi persyaratan di atas. Namun seiring dengan semakin meningkatnya volume dan kompleksitas dari pertukaran tersebut, maka logam (emas dan perak) tersebut menjadi tidak memuaskan (*inconvenient*). Perkembangan perdagangan dan skala bisnis yang semakin tinggi melebihi kemampuan uang sebagai bentuk yang efisien untuk transaksi keuangan yang besar, maka akan digunakan bentuk lain dari uang.

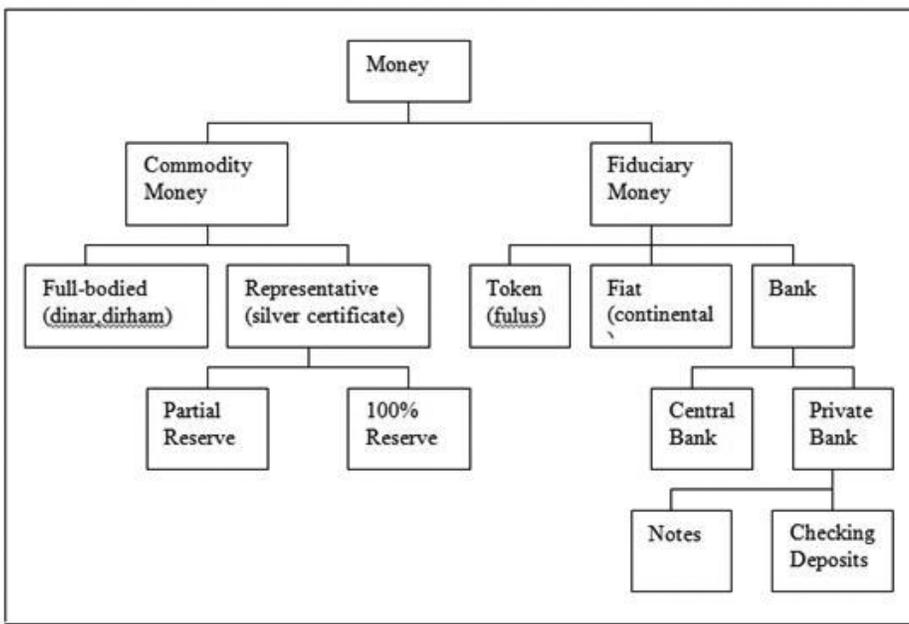
b. *Token money* (uang kertas/tanda)

Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak, yaitu bank dan *goldsmith* (orang yang meminjamkan uang). Berdasarkan hal itu, bank dan *goldsmith* mengeluarkan tanda terima (*receipt*) atau uang kertas, yang kemudian menjadi *medium of exchange*. Dengan demikian, tanda terima (*receipt*) untuk deposit atau *bank notes* yang selanjutnya disebut *token money* (uang kertas) menggantikan *commodity money*. Karena stabilitas nilai uang adalah tanggung jawab pemerintah, maka pencetakan uang dimonopoli oleh pemerintah dan masyarakat dilarang untuk mencetak dan mengedraikan uang palsu.

c. *Deposit money* (uang giral)

Semakin pesatnya pertumbuhan industri dalam rangka memenuhi kebutuhan

yang semakin meningkat, mengakibatkan semakin tingginya kebutuhan uang dalam jumlah besar, misalnya untuk keperluan pembangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian bahan baku dalam jumlah besar dan transaksi antar negara dalam jumlah besar. Untuk itu, diperlukan perubahan di bidang keuangan, terutama cara pembayaran, melalui penggunaan *cheque*. Inilah yang selanjutnya muncul uang giral yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran *cheque*. Namun demikian, menurut Irving Fisher, *cheque* bukan uang, tetapi hanya merupakan order tertulis (*written order*) untuk mentransfer uang. Uraian di atas dapat digambarkan dalam bagan berikut;



Sumber: Karim, 2007.

Gambar 1. Bentuk Uang

Teori permintaan uang

Teori permintaan uang pada hakikatnya merupakan teori tentang alokasi sumber-sumber ekonomi yang sifatnya terbatas. Seseorang yang memegang uang akan dihadapkan pada keuntungan dan kemungkinan kerugian dari kepemilikan suatu bentuk kekayaan. Keuntungan seseorang yang memegang uang kas

akan mendapatkan tingkat likuiditas yang dapat dibelanjakan, namun ia akan dihadapkan pada kemungkinan hilangnya peluang untuk mendapatkan nilai lebih uang (*value added of money*) seandainya uang tersebut diinvestasikan dalam kegiatan yang produktif. Selain itu, memegang uang kas juga akan terkena resiko dari menurunnya nilai riil dari uang akibat adanya inflasi (Karim, 2007: 180-181).

Dalam teori permintaan uang konvensional, suku bunga merupakan biaya yang digunakan untuk menjelaskan perilaku individu dalam mengelola uang kas riilnya. Secara garis besar, teori permintaan uang konvensional dapat dikelompokkan, yaitu teori permintaan uang klasik dan teori permintaan uang Keynes dan teori permintaan post-Keynes (Suprayitno, 2005: 189).

a. Teori Permintaan Uang Klasik

Teori permintaan uang klasik tercermin dalam *Quantity Theory of money* (teori kuantitas uang). Pada awalnya teori ini diperuntukkan untuk menerangkan peranan uang dalam perekonomian. Menurut Fisher sebagaimana diungkapkan Suprayitno (2005: 189), apabila terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, maka terjadi pertukaran antara uang dan barang/jasa, sehingga nilai dari uang yang ditukarkan pastilah sama dengan nilai barang/jasa yang ditukarkan.

Secara sederhana, Irving Fisher dalam Karim (2007: 77) merumuskan teori permintaan uang sebagai berikut:

$$MV = PT$$

Keterangan:
M = Jumlah uang
V = Tingkat perputaran uang
P = Tingkat harga barang
T = Jumlah barang yang diperdagangkan

Menurut Irving Fisher, keberadaan uang pada hakikatnya adalah *flow concept*. Fungsi uang sebagai *medium of exchange* dan oleh karenanya tidak ada kaitan antara uang dengan tingkat suku bunga (Arifin, 1999: 57). Dengan demikian, keberadaan uang atau permintaan uang tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, tetapi besar kecilnya uang akan ditentukan oleh kecepatan perputaran uang (*velocity of money*).

Sementara itu, Marshall-Pigou sebagaimana diungkapkan oleh Suprayitno (2005: 190) dari Cambridge School juga merumuskan formulasi yang agak berbeda dengan Fisher. Menurutnya, fungsi uang, selain sebagai *medium of exchange*, juga sebagai *store of value*. Setiap orang mempunyai *individual choice* dalam menyimpan hartanya, apakah dalam bentuk *non-financial asset* atau *financial asset*, dan uang adalah salah satunya (Arifin, 1999: 57). Dengan demikian, keinginan seseorang untuk memegang uang tunai adalah proporsional terhadap pendapatan seseorang, yang secara matematis dapat dinyatakan oleh Karim (2007: 78) dalam formulasi sebagai berikut;

$$M = kPT$$

Keterangan:
M = Jumlah uang
k = $1/v$
P = Tingkat harga barang
T = Jumlah barang yang diperdagangkan

Persamaan matematik Marshall di atas menunjukkan bahwa *demand for holding money* adalah suatu proporsi (k) dari jumlah pendapatan (PT). Semakin besar k, maka semakin besar *demand for holding money* (M) untuk tingkat pendapatan tertentu (PT). Menurut Karim (2007: 78), hal ini menunjukkan bahwa konsep Marshall menyatakan bahwa uang adalah *stock concept*. Oleh sebab itu, kelompok Cambridge mengatakan bahwa uang adalah salah satu cara untuk menyimpan kekayaan (*store of wealth*). Meskipun Marshall tidak menyebut secara eksplisit, inilah awal pemikiran bahwa uang terkait erat dengan tingkat bunga sebagai *price of money*, yang pada akhirnya menjadikan uang sebagai bahan komoditas (Arifin, 1999: 57). Dalam perkembangannya, teori Marshall kemudian dijabarkan oleh Keynes sehingga melahirkan madzhab Keynesian.

b. Teori Permintaan Uang menurut Keynes

Menurut Keynes sebagaimana diungkapkan oleh Suprayitno (2005: 191-193), keinginan seseorang untuk mengatur uang atau asetnya dipengaruhi oleh tiga (3) hal, yaitu:

1) *Money demand for transactions* (permintaan uang untuk bertransaksi).

Permintaan uang untuk tujuan transaksi ditentukan oleh tingkat pendapatan. Permintaan uang ini timbul karena adanya kebutuhan untuk membayar transaksi biasa. Fungsi uang dalam *money demand for transactions* ini sebagai *medium of exchange* (alat tukar).

2) *Money demand for precautionary* (permintaan uang untuk berjaga-jaga).

Permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga timbul karena setiap orang menghadapi ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang (memenuhi kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga). Ketidakpastian ini menyebabkan orang memegang uang tunai lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk tujuan bertransaksi. Menurut Keynes, jumlah uang yang dipegang untuk tujuan ini bergantung pada tingkat penghasilan.

3) *Money demand for speculation* (permintaan uang untuk spekulasi).

Permintaan uang untuk spekulasi ini dipengaruhi oleh tingkat bunga dan harapan mengenai harga di masa yang akan datang. Permintaan uang ini timbul karena seseorang ingin mendapatkan keuntungan dari adanya peluang dalam pasar komoditi dan *financial market*. Dari permintaan uang ketiga inilah, suku bunga sebagai biaya *opportunity* muncul, dimana semakin tinggi suku bunga, maka semakin rendah permintaan uang untuk spekulasi, begitu juga sebaliknya.

c. Teori Permintaan Uang post-Keynes

Teori permintaan uang Keynes sebagaimana dikemukakan di atas, ternyata dianggap tidak memuaskan, sehingga muncullah beberapa teori permintaan uang yang menyempurnakan teori permintaan uang Keynes, diantaranya Baumol dalam teorinya *inventory approach* menyempurnakan teori permintaan uang untuk tujuan transaksi dan Tobin dengan *portofolio analysis* menyempurnakan teori permintaan uang untuk tujuan spekulasi (Suprayitno, 2005: 194-195).

Uang: Perspektif Ekonomi Islam

Uang dalam sejarah Islam

Dalam literatur hukum Islam, terdapat beberapa istilah untuk menyebut uang,

antara lain adalah *nuqud*, *tsaman*, *fulus*, *sikkah* dan *'umlah*. Istilah *tsaman* memiliki beberapa arti, antara lain berarti *qimah*, yaitu nilai sesuatu dan harga pembayaran barang yang dijual. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan uang emas dan perak. *Fulus* digunakan untuk pengertian logam bukan emas dan perak yang dibuat dan berlaku di tengah-tengah masyarakat sebagai uang dan pembayaran. *Sikkah* dipakai untuk dua pengertian, yaitu (1) stempel besi untuk mencap mata uang; dan (2) mata uang dinar dan dirham yang telah dicetak dan distempel. *'Umlah* memiliki dua pengertian, yaitu (1) satuan mata uang yang berlaku di negara atau wilayah tertentu, misalnya *'umlah* yang berlaku di Indonesia adalah rupiah, di Yordania adalah dinar; (2) mata uang dalam arti umum sama dengan *nuqud* (Karim, 2007: 305). Namun, istilah yang sering digunakan oleh ulama fiqh adalah *nuqud* dan *tsaman*.

Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan pengertian *nuqud*. Sebagian ulama mendefinisikan *nuqud* sebagai semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik dinar emas, dirham perak maupun fulus tembaga. Ulama lain mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai. Sementara itu, Qal'ah Ji dalam Karim (2007: 306) mengemukakan definisi *nuqud* adalah sesuatu yang dijadikan harga oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.

Meskipun istilah *nuqud* ini cukup populer untuk pengertian uang, namun ternyata, kata itu tidak ditemukan di dalam al-Qur'an. Untuk menunjukkan uang dan fungsinya, baik sebagai alat pengukur nilai maupun penyimpan nilai, al-Qur'an menggunakan beberapa istilah, antara lain *dirham*, *dinar*, *emas* dan *perak*. Kata "dirham" hanya disebutkan satu kali, yaitu dalam QS. Yusuf, (12): 20, kata "dinar" juga hanya disebut satu kali dalam QS. Ali Imran, (3): 75, kata "emas" disebut sebanyak delapan kali, diantaranya dalam QS. At-Taubah, (9): 34, sedangkan kata "perak" disebut enam kali dalam al-Qur'an, di antaranya dalam QS. al-Kahfi, (18): 19.

Dalam sejarah Islam, al-Maqrizi mengemukakan bahwa mata uang yang beredar di kalangan bangsa Arab pada masa jahiliyah adalah emas dan perak, tidak ada yang lain, yang datang dari berbagai kerajaan. *Dinar Heraclius* (Kaisar Byzantin) berasal dari Romawi, sedangkan *dirham* perak berasal dari Persia

(Karim, 2007: 308).

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa uang yang digunakan oleh umat Islam pada masa Rasulullah adalah dinar emas Romawi dan dirham perak Persia dalam bentuk aslinya. Sedangkan khalifah yang pertama kali menerbitkan dinar dan dirham untuk diberlakukan di negara Islam adalah khalifah Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan pada tahun 74 H. Kebijakan pembuatan uang Islami seperti itu dilanjutkan oleh pemerintah-pemerintah Islam sesudahnya dan pada skhir Daulah Utsmaniyah mulailah uang kertas beredar dan berlaku di hampir semua wilayah Islam (Karim, 2007: 309). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *nuqud* dan *tsaman* adalah persoalan tradisi dan praktik (*'urf ishtislahi*) yang digunakan oleh masyarakat dan tidak terbatas hanya pada materi atau bahan tertentu.

Konsep dan fungsi uang dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, uang bukan *capital*. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional sering diartikan secara bolak-balik (*interchangeability*) yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai *capital* (Karim, 2007: 77).

Menurut Ibn Taimiyah sebagaimana diungkapkan oleh Islahi (1988: 140), uang dalam Islam adalah alat tukar dan alat pengukur nilai. Uang dimaksudkan sebagai alat pengukur dari nilai suatu barang, melalui uang, nilai suatu barang akan diketahui dan mereka tidak menggunakannya untuk diri sendiri atau dikonsumsi. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh muridnya, Ibn Qayyim bahwa uang dan keping uang tidak dimaksudkan untuk benda itu sendiri, tetapi dimaksudkan untuk memperoleh barang-barang (sebagai alat tukar). Dalam kaitannya dengan konsep uang, al-Ghazali dalam Muhammad (2005: 6) mengungkapkan bahwa: “uang bagaikan kaca, kaca tidak memiliki warna, tetapi ia dapat merefleksikan semua warna. Uang tidak memiliki harga, tetapi uang dapat merefleksikan semua harga”.

Dari definisi dan teori mengenai uang di atas, secara umum uang dalam Islam diartikan sebagai alat tukar dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Dengan demikian, uang bukan merupakan komoditi. Oleh karena itu, motif memegang uang dalam Islam

adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga saja, bukan untuk spekulasi (Ascarya, 2007: 22-23).

Hal ini disebabkan karena perbuatan yang mengarah kepada motif spekulasi dilarang dalam Islam. Untuk itu, instrumen moneter yang ada dihindarkan dari penggunaan variabel yang akan mengarahkan kepada motif spekulasi. Keberadaan instrumen pengganti suku bunga diarahkan penggunaannya terhadap uang yang memiliki tujuan yang bersifat penting dan mendesak serta investasi yang produktif dan efisien (Karim, 2007: 186).

Dalam Islam, *capital is private goods*, sedangkan *money is public goods*. Uang yang ketika mengalir adalah *public goods (flow concept)* lalu mengendap ke dalam kepemilikan seseorang (*stock concept*) dan uang tersebut menjadi milik pribadi (*private goods*). Uraian mengenai konsep uang sebagai *flow concept* dan *public goods* dapat dijelaskan oleh Muhammad (2004: 71) sebagai berikut:

a. Uang sebagai *Flow concept*

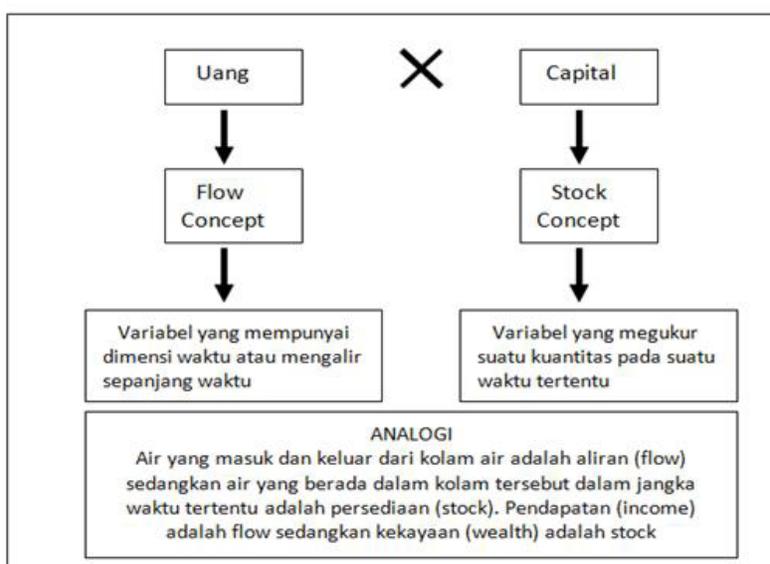
Dalam Islam, uang adalah *flow concept* sedangkan *capital* adalah *stock concept*. Semakin cepat perputaran uang, maka semakin baik. Uang dapat diibaratkan seperti air. Jika air dialirkan, maka air tersebut akan bersih dan sehat. Namun jika air dibiarkan menggenang dalam suatu tempat, maka air tersebut akan keruh (kotor). Demikian juga halnya dengan uang, uang yang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran ekonomi dan kesehatan masyarakat. Sementara itu, jika uang ditahan (menimbun uang), maka dapat menyebabkan macetnya roda perekonomian sehingga dapat menimbulkan krisis ekonomi. Untuk itu, uang perlu digunakan untuk investasi di sektor riil. Jika uang hanya disimpan, maka bukan saja tidak mendapatkan *return*, tetapi juga dikenakan zakat.

b. Uang sebagai *Public Goods*

Uang sebagai *public goods* memiliki ciri sebagai barang yang dapat digunakan oleh masyarakat tanpa menghalangi orang lain untuk menggunakannya. Uang sebagai *public goods* diibaratkan jalan raya dan *capital* sebagai *private goods* diibaratkan dengan kendaraan. Jalan raya dapat digunakan oleh siapa saja tanpa terkecuali, tetapi masyarakat yang mempunyai kendaraan berpeluang lebih besar dalam pemanfaatan jalan raya dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan. Begitu pula dengan uang. Uang sebagai *public*

goods dapat dimanfaatkan lebih banyak oleh masyarakat yang lebih kaya. Hal ini bukan karena simpanan mereka di bank, tetapi karena asset mereka, seperti rumah, mobil, saham, dan lain-lain yang digunakan di sektor produksi sehingga memberikan peluang yang lebih besar kepada orang tersebut untuk memperoleh lebih banyak uang. Jadi, semakin tinggi tingkat produksi, maka akan semakin besar kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari uang (*public goods*) tersebut. Oleh karena itu, penimbunan dilarang karena menghalangi orang lain menggunakan *public goods* tersebut (Karim, 2007: 89).

Untuk memudahkan pemahaman mengenai konsep uang dalam Ekonomi Islam, dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Karim,2007.

Gambar 2. Konsep Uang dalam Islam

Jika dibandingkan antara konsep uang dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Konsep Uang menurut Ekonomi Konvensional dan Islam

Uang	Ekonomi Konvensional	Ekonomi Islam
Konsep Uang	1. Uang identik dengan modal	1. Uang tidak identik dengan modal

	<ul style="list-style-type: none"> 2. Uang (modal) adalah <i>private goods</i> 3. Uang (modal) adalah <i>flow concept</i> bagi Fisher 4. Uang (modal) adalah <i>stock concept</i> bagi Cambridge School 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Uang adalah <i>public goods</i> 3. Modal adalah <i>private goods</i> 4. Uang adalah <i>flow concept</i> 5. Modal adalah <i>stock concept</i>
Fungsi Uang	<ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Medium of Exchange</i> 2. <i>Store of Value</i> 3. <i>Unit of Account/Measure of Value</i> 4. <i>Standard for Deferred Payment</i> 	<ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Medium of Exchange</i> 2. <i>Unit of Account/Measure of Value</i>

Sumber: Karim, 2007.

Perbedaan dan persamaan ini sesungguhnya dapat ditarik dari teori masing-masing tentang permintaan uang sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Berangkat dari perbedaan konsep inilah, muncul ide bunga dalam ekonomi konvensional dan bagi hasil dalam ekonomi Islam yang selanjutnya diaplikasikan dalam konsep perbankan.

Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam

Kerangka dasar kebijakan moneter

Hadirnya uang dalam sistem perekonomian akan mempengaruhi perekonomian suatu negara, yang biasanya terkait dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian *monetary aggregates* (besaran moneter, diantaranya berupa uang beredar, uang kredit atau kredit perbankan) untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Jumlah uang beredar, dalam analisis ekonomi makro, memiliki pengaruh penting terhadap tingkat output perekonomian dan stabilitas harga-harga. Uang beredar yang terlalu tinggi tanpa disertai kegiatan produksi yang seimbang akan ditandai dengan naiknya tingkat harga dalam perekonomian, yang sering disebut dengan inflasi (Nasution, dkk, 2006: 261).

Dengan demikian, kebijakan moneter menjadi faktor penting dalam menstabilisasi siklus bisnis. Kebijakan moneter yang dikelola dengan baik akan menghasilkan tingkat perekonomian yang stabil melalui mekanisme transmisinya pada harga dan output, yang pada akhirnya membawa efek multiplier pada variabel-variabel lain, seperti tenaga kerja. Sebaliknya, sistem moneter yang *unreliable* akan membawa pada masalah inflasi dan depresi.

Mekanisme transmisi kebijakan moneter, pada umumnya mengacu pada peran uang dalam perekonomian, yang pertama kali dijelaskan oleh *Quantity Theory of money* (teori kuantitas uang). Teori ini pada dasarnya menggambarkan kerangka kerja yang jelas mengenai analisis hubungan langsung yang sistematis antara pertumbuhan jumlah uang yang beredar dan inflasi, yang dinyatakan dalam formulasi yang dikenal dengan *The Equation of Exchange*: $MV = PT$. Dengan kata lain, menurut Rivai, dkk (2007: 89) dalam keseimbangan, jumlah uang beredar yang digunakan dalam seluruh kegiatan transaksi ekonomi (MV) sama dengan jumlah output yang dihitung dengan harga yang berlaku, yang ditransaksikan (PT).

Untuk melihat hubungan antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan inflasi, terdapat dua asumsi yang dipakai. Pertama, perkembangan tingkat perputaran uang (V) cukup stabil atau setidaknya dapat diprediksi. Kedua, dalam jangka panjang, perkembangan output atau transaksi ekonomi riil (T) yang pada umumnya dapat dianggap konstan dan tidak dipengaruhi oleh perkembangan jumlah uang beredar (*long-run money neutrality*), namun dipengaruhi oleh perkembangan sisi penawaran dalam perekonomian, seperti jumlah dan produktivitas tenaga kerja, ketersediaan modal dan kemajuan teknologi.

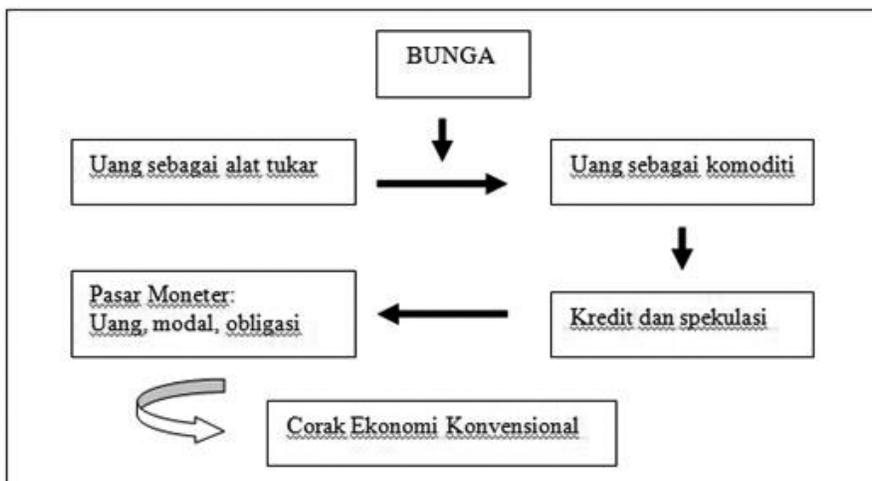
Berdasarkan mekanisme transmisi ini, dalam jangka pendek, pertumbuhan jumlah uang beredar hanya mempengaruhi perkembangan output riil. Selanjutnya, dalam jangka menengah pertumbuhan jumlah uang beredar akan mendorong kenaikan harga (inflasi), yang pada gilirannya akan menyebabkan penurunan perkembangan output riil menuju posisi semula. Dalam memelihara keseimbangan jangka panjang, pertumbuhan jumlah uang beredar tidak berpengaruh pada perkembangan output riil tetapi mendorong kenaikan laju inflasi secara proporsional. Jalur moneter yang bersifat langsung ini dianggap tidak dapat menjelaskan pengaruh faktor-faktor, selain uang terhadap inflasi, seperti suku bunga, nilai tukar, harga aset, kredit dan ekspektasi. Dalam

perkembangan selanjutnya, selain jalur moneter langsung (*direct monetary channel*), mekanisme transmisi pada umumnya juga dapat terjadi melalui lima jalur lainnya, yaitu (1) jalur suku bunga; (2) jalur nilai tukar; (3) jalur harga aset; (4) jalur kredit; dan (5) jalur ekspektasi (Rivai, dkk, 2007: 89).

Sementara itu, instrumen moneter bank sentral di Indonesia, yaitu Operasi Pasar Terbuka (OPT), Fasilitas Diskonto, Giro Wajib Minimum dan Imbauan. Instrumen OPT dilakukan melalui lelang surat-surat berharga, yang ditujukan untuk menambah atau mengurangi likuiditas di pasar uang. Sementara itu, fasilitas diskonto adalah fasilitas kredit yang diberikan pada bank-bank dengan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan GWM merupakan jumlah alat likuid minimum yang wajib dipelihara oleh Bank Indonesia (Rivai, dkk, 2007: 99).

Peranan uang dalam kebijakan moneter

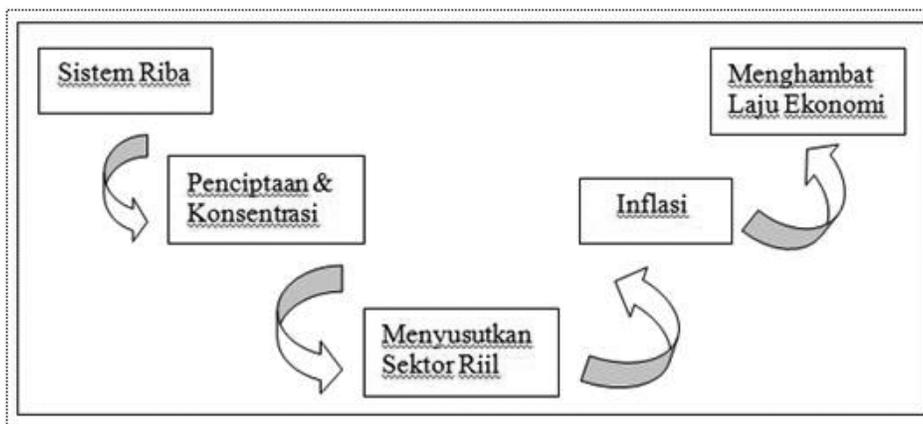
Dalam ekonomi konvensional, fungsi uang disamakan dengan komoditi sehingga menyebabkan timbulnya pasar tersendiri dengan uang sebagai komoditinya dan bunga sebagai harganya. Pasar ini adalah pasar moneter yang tumbuh sejajar dengan pasar riil (barang dan jasa) berupa pasar uang, pasar modal, pasar obligasi dan pasar derivatif. Akibatnya, dalam ekonomi konvensional timbul dikotomi sektor riil dan moneter.



Sumber: Ascarya, 2007.

Gambar 3. Corak Ekonomi Konvensional

Lebih jauh lagi, sistem riba, *fiat money*, *commodity money*, dan pembolehan spekulasi akan menyebabkan penciptaan uang (kartal dan giral) dan tersedotnya uang di sektor moneter untuk mencari keuntungan tanpa resiko. Akibatnya, uang atau investasi yang seharusnya tersalur ke sektor riil untuk tujuan produktif sebagian besar lari ke sektor moneter dan menghambat pertumbuhan bahkan menyusutkan sektor riil. Selanjutnya penciptaan uang tanpa adanya nilai tambah akan menimbulkan inflasi. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang menjadi tujuan akan terhambat (Rivai, dkk (2007: 27).



Sumber: Ascarya, 2007.

Gambar 4. Implikasi Bunga pada Perekonomian

Dikotomi sektor riil dan moneter tidak terjadi dalam ekonomi Islam karena absennya sistem bunga dan dilarangnya memperdagangkan uang sebagai komoditi sehingga corak ekonomi Islam adalah ekonomi sektor riil dengan fungsi uang sebagai alat tukar untuk memperlancar kegiatan investasi, produksi dan perniagaan di sektor riil.

Manajemen moneter syari'ah: sebuah alternatif

Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan sebagaimana dirumuskan oleh Iqbal dan Khan dalam Muhammad (2002: 16) diantaranya:

1. *Economic well-being with full employment and optimum rate of economic growth.*
2. *Socio-economic justice and equitable distribution of income and wealth.*
3. *Stability in the value of money.*

Hal ini dapat dijelaskan bahwa keadilan sosial-ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan merupakan tujuan yang penting dalam kerangka Islam. Sementara tujuan pertama dan ketiga sebenarnya sama dengan tujuan yang dirumuskan oleh ekonom konvensional. Hanya saja, dalam ekonomi konvensional tidak menekankan adanya keadilan sosial-ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan.

Sebuah pertanyaan menarik untuk dikaji, dapatkah manajemen moneter syari'ah dapat diterapkan di Indonesia? Menurut saya, manajemen moneter syari'ah dimungkinkan untuk diterapkan di Indonesia, karena berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah bahwa perbankan syari'ah dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2004 Jo. 23 Tahun 1999 Bank Indonesia dapat melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syari'ah.

Seiring dengan itu, BI sebagai bank sentral telah mengeluarkan informasi tentang Peraturan Bank Indonesia bagi Bank Umum berdasarkan prinsip bagi hasil, yaitu tentang Giro Wajib Minimum (GWM), kliring, Pasar Uang antar-Bank berdasarkan prinsip syari'ah, Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank Syari'ah (Sertifikat IMA) dan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia/SWBI (Muhammad (2002: 176). Inilah yang sekarang menjadi instrumen moneter bank sentral di Indonesia.

Kesimpulan

Di akhir tulisan ini, menarik untuk mencermati pernyataan Ibn Khaldun bahwa "suatu negeri tidak akan mungkin mampu melakukan pembangunan secara berkesinambungan tanpa adanya keadilan dalam sistem yang dianutnya". Dengan demikian, keberadaan uang dalam sebuah perekonomian memberikan arti penting karena ketidakadilan dari alat ukur yang diakibatkan adanya instabilitas nilai tukar uang akan mengakibatkan perekonomian tidak berjalan dengan pada titik keseimbangan. Hal ini akan mempersulit untuk merealisasikan keadilan dalam sosial ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Untuk itu, kebijakan moneter yang diterapkan harus mampu menciptakan stabilitas harga sehingga terjaminnya uang dalam fungsinya sehingga perekonomian akan relatif berada dalam kondisi yang memungkinkan

teralokasinya sumber daya secara merata, terdistribusinya pendapatan, *optimum growth*, *full employment* dan stabilitas perekonomian.

Daftar Pustaka

- A. Mansur. 2005. "Konsep Uang dan Bank: Studi Komparatif antara Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam", dalam *Ontologi Kajian Islam*, Seri 9.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Zainul. 1999. *Memahami Bank Syari'ah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alvabet.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Islahi, Abdul Azim. 1988. *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. London: The Islamic Foundation.
- Karim, Adiwarman. 2007. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1997. *Islamic Economic, Theory and Practice*, (terjemahan Nastangin). Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Muhamad. 2002. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- . 2005. *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, Yogyakarta.
- . 2005. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Rahman, Afzalur. 2002. *Economics Doctrines of Islam*, (terjemahan Soeroyo dan Nastangin). Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rivai, Veithzal, dkk. 2007. *Bank and Financial Institution Manajement Conventional and Sharia System*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.